



---

**RENCANA STRATEGIS 2017 - 2019**

---

**LOKA RISET SUMBER DAYA DAN  
KERENTANAN PESISIR**

---

*LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR  
PUSAT RISET KELAUTAN  
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN*

---

# KATA PENGANTAR

Pembangunan Kelautan dan Perikanan diamanatkan untuk dilaksanakan secara berkelanjutan tanpa mengganggu kelestarian lingkungan dan sumberdayanya. Oleh karena itu *research based policy*, atau kebijakan berbasis riset, harus dijadikan norma dan budaya umum dalam pengambilan keputusan pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir.

Penyelenggaraan riset dan pengembangan Iptek sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa di bidang kelautan dan perikanan juga diamanatkan oleh Undang-Undang. Berikut Undang-Undang yang memberi amanat kepada pemerintah untuk melakukan riset di bidang kelautan dan perikanan:

1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan The United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Rencana strategis Loka Penelitian Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir ini disusun untuk memberikan dukungan kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir yang berkelanjutan dan berdaya saing serta meningkatkan kemandirian pengelolaan sumberdaya tersebut.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberi kontribusi atas tersusunnya Rencana Strategis ini.

Padang, Januari 2019



Nia Nailul Hasanah R.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) Tahun 2017-2019 bertolak dari perubahan kelembagaan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mengatur pembentukan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM). Selain itu, penyusunan Renstra juga terkait penyesuaian dengan hasil revidi dari Rencana Strategis Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir (Renstra P3SDLP) Tahun 2015–2019.

Renstra KKP menjelaskan bahwa Visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi KKP adalah “**Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional**”. Dari pernyataan Visi KKP tersebut, terdapat tiga pilar yang menjadi Misi KKP yaitu: Kedaulatan (*sovereignty*), Keberlanjutan (*sustainability*), dan Kesejahteraan (*prosperity*).

Aspek Misi **Kedaulatan (Sovereignty)** berusaha mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Misi **Keberlanjutan (Sustainability)** bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Misi **Kesejahteraan (Prosperity)** ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

### B. KONDISI UMUM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan

kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Dalam kaitannya dengan tujuan tersebut maka LRSDKP ikut serta secara aktif mewujudkannya lewat kegiatan riset. Kegiatan yang dilakukan oleh LRSDKP menitikberatkan pada riset kerentanan dan dukungannya terhadap sumber daya pesisir. Hasil riset di area WPP sejak tahun 2011–2014 telah dikaji oleh Pusat Riset Kelautan untuk selanjutnya difinalisasi oleh institusi terkait antara lain Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut (Mabes TNI AL), Dinas Hidro Oseanografi (Dishidros)-TNI AL serta Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dilanjutkan penyusunan Peraturan Menteri (PerMen) tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) untuk disahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

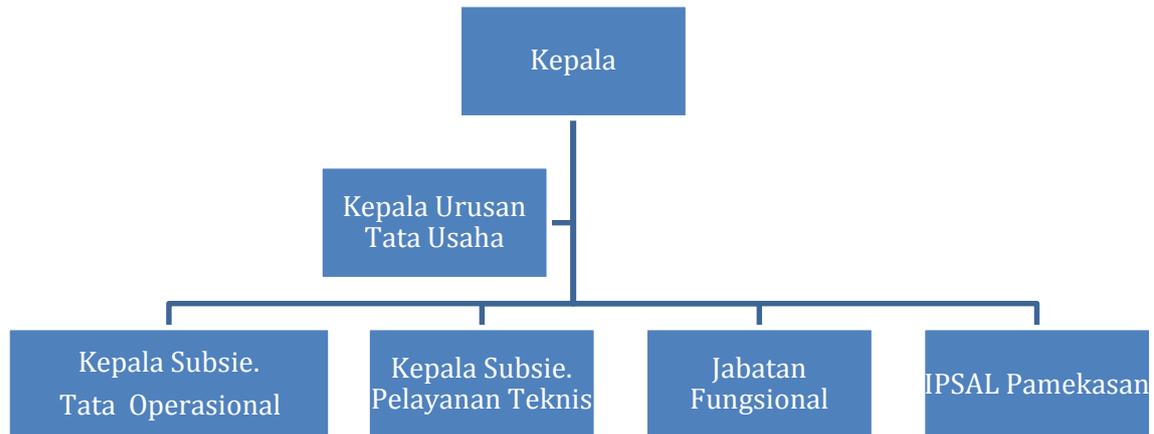
Pemantauan anomali tinggi muka air laut di perairan Indonesia menghasilkan *data base* parameter-parameter dinamika laut secara spasial dan temporal. *Data base* ini akan berguna bagi kajian perkiraan daerah *fishing ground*. Penelitian toponimi melalui kajian unsur rupa bumi teluk dan tanjung telah dilakukan di Teluk Bungus (Padang-Sumatera Barat) dan dihasilkan Panduan Survei Toponim Maritim, Format Pangkalan Data, Database Toponim Teluk dan Tanjung. Eksplorasi dasar laut Kawasan Timur Indonesia (KTI) dilakukan dengan metoda termografik seismik telah menghasilkan informasi geodinamika zona subduksi dan sebaran naiknya materi panas dari dalam bumi serta diketahui potensi keberadaan gunung api di bawah laut dan aktifitas hidrotermal.

## **C. POTENSI**

### **1.1. Kelembagaan**

Dalam struktur Program dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas LRSDKP masuk dalam Program Riset dan Sumber Daya Manusia. LRSDKP berada di bawah Pusat Riset Kelautan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan dibidang Riset Perekayasaan dan Pengkajian Teknologi Kelautan, Sumber Daya Laut dan Pesisir, berdasarkan kebijakan teknis Kepala Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan. Struktur LRSDKP membawahi tiga unit setingkat eselon V dan satu instalasi non struktural, yaitu:

- Urusan Tata Usaha;
- Subsie. Tata Operasional;
- Subsie. Pelayanan Teknis; dan
- Instalasi Pengembangan Sumber Daya Air Laut di Pamekasan, Jawa Timur



## 1.2. Keragaman SDM

LRSDKP memiliki pegawai berjumlah 29 orang terdiri dari 16 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 13 Non-ASN dengan tingkat pendidikan dan disiplin ilmu yang beragam. Secara struktur pegawai terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana. Keberagaman Sumber Daya Manusia LRSDKP dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel : 1.1 Keragaman SDM LRSDKP

SDM	JUMLAH
Jabatan Struktural	4 Orang
Jabatan Fungsional	8 Orang
Pelaksana Administrasi	4 Orang
Tenaga Kontrak	14 Orang
Jumlah	30 Orang

### 1.2.1. Komposisi berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

Tabel : 1.2 Komposisi berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH	KET
1	Struktural		
	- Eselon IV	1 Orang	Kepala Loka
	- Eselon V	3 Orang	Ka. Subsie & Ka. Urusan
2.	Jabatan Fungsional		
	Peneliti	2 Orang	
	Calon Peneliti	5 Orang	
	Teknisi Litkayasa	1 Orang	
3.	Pelaksana Administrasi	4 Orang	
4.	Tenaga Kontrak	14 Orang	

### 1.2.2. Komposisi berdasarkan Golongan Ruang

Tabel : 1.3 Komposisi berdasarkan Golongan Ruang

NO	GOLONGAN	RUANG					JUMLAH
		e	d	c	b	a	
1	III	-	2	2	4	4	13
2	II	-	4				3
3	I	-	-	-	-	-	
Jumlah							16

Sebelumnya jumlah ASN di LRSDKP mencapai 20 pegawai. Seiring dengan perkembangan waktu, berkurang karena permintaan mutasi dan tidak ada penggantian kembali. Hal ini menjadi salah satu kekurangan LRSDKP, terutama di bagian administrasi yang berimbas pada beberapa pegawai yang harus merangkap tugas.

### 1.2.3. Komposisi berdasarkan Usia

Sesuai dengan Tabel 1.4 di bawah, pada tahun 2017, maka jumlah pegawai LRSDKP menurut usia, rata-rata berusia antara 26-45 tahun. Hal ini memperlihatkan bahwa pegawai struktural maupun fungsional masih berada pada usia produktif. Hal ini merupakan satu keunggulan dari potensi SDM LRSDKP.

Tabel : 1.4 Komposisi berdasarkan Usia

No	USIA	JUMLAH	
		Laki	Perempuan
1	26 - 35	6	3
2	36 - 45	5	2
3	46 - 55	-	-
4	> 56	-	-
Jumlah		11	5

#### 1.2.4. Komposisi Berdasarkan Pendidikan

Sesuai dengan Tabel 1.5 di bawah, maka LRSDKP pada tahun 2015 jumlah ASN menurut tingkat pendidikan menunjukkan pola dinamis. Terjadi perubahan komposisi terus-menerus dari tahun ke tahun sebagai imbas adanya mutasi pegawai.

Tabel : 1.5 Komposisi berdasarkan Pendidikan ASN LRSDKP

PENDIDIKAN	2011	2012	2013	2014	2015
D3	4	4	4	7	6
S1	5	7	5	5	8
S2	2	3	2	2	4
S3					
JABFUNG					
Calon Peneliti	2	2	-	-	5
Peneliti Pertama	5	7	5	4	3
Peneliti Muda	-		1	3	2
Peneliti Madya					

#### D. PERMASALAHAN

Pada bagian sebelumnya, telah ditunjukkan tentang potensi LRSDKP sebagai UPT yang menangani riset kerentanan dan sumber daya pesisir. Urgensi kebijakan yang didasarkan oleh kegiatan penelitian serta aspek legal telah menuntut peranan yang lebih besar dari KKP dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Hal ini juga menjadi semangat berkegiatan LRSDKP sebagai salah satu ujung tombak KKP dalam menangani permasalahan non hayati di wilayah pesisir. Namun demikian, secara umum, dalam

pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia ada sejumlah permasalahan utama, antara lain:

- 1) Gambaran potensi kelautan dan perikanan yang besar belum menggambarkan peranan yang maksimal dari LRSDKP. Rekomendasi bagi pengelolaan perikanan tangkap, budidaya laut, pemanfaatan wilayah pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil, dan kelautan serta sosial ekonomi kelautan dan perikanan laut masih belum banyak yang teradopsi oleh para pengguna sebagai bahan kebijakan. Padahal, penyelesaian berbagai permasalahan kelautan yang terus berkembang dan lebih kompleks harus terus dilakukan melalui kebijakan yang diambil berbasiskan iptek hasil penelitian. Terlebih-lebih dalam menghadapi perubahan iklim global diperlukan adanya cara-cara beradaptasi dengan dampak perubahan iklim tersebut.
- 2) Pembangunan kelautan dan perikanan sudah disadari harus dilakukan secara berkelanjutan agar sumberdayanya dapat dimanfaatkan secara optimal dengan cara-cara pengelolaan yang dilakukan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna. Namun demikian, hasil penelitian dan pengembangan sampai saat ini belum sepenuhnya menjadi landasan bagi bahan kebijakan berbasis hasil litbang.
- 3) Masih terbatasnya jangkauan pelayanan LRSDKP karena luasnya wilayah kerja pembangunan kelautan dan perikanan. Secara umum di seluruh Indonesia banyak wilayah yang memerlukan penanganan riset untuk menghasilkan kemajuan-kemajuan. Dalam tataran Eselon I (BRSDM KP), kondisi ini diperparah oleh domisili unit-unit kerja litbang tersebut yang secara geografis tidak tersebar secara merata, termasuk juga LRSDKP. Posisi LRSDKP berada di wilayah barat Indonesia dengan sebaran wilayah kerja hingga ujung timur Indonesia. Dalam melakukan riset membutuhkan lebih banyak anggaran untuk perjalanan jika wilayah yang jadi lokasi riset berada di timur Indonesia.

Hal lain yang masih menjadi permasalahan organisasi yaitu sampai dengan akhir periode RPJM Nasional II masih terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP di luar BRSDM KP yang melaksanakan tugas litbang, atau menghasilkan produk litbang. Sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-kementerian, maka UPT yang melakukan litbang semestinya kedudukannya berada di bawah badan yang mempunyai tugas di bidang litbang. Keberadaan UPT yang menghasilkan iptek di bawah unit eselon I di luar BRSDM KP menjadi kendala bagi BRSDM KP dalam mengoptimalkan

dukungannya. Seharusnya iptek adalah output spesifik bagi BRSDM KP dan dijadikan masukan bagi unit-unit eselon I lainnya.

- 4) Masih dijumpai adanya kelemahan dalam *research management*. Kegiatan riset bersama atau terintegrasi masih belum terbangun dengan baik seperti kegiatan lintas Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Eselon II pada topik tertentu yang memerlukan jaringan. Contoh penelitian yang memerlukan kebersamaan yaitu penelitian yang terkait dengan peningkatan produksi agar Indonesia menjadi penghasil perikanan terbesar, revitalisasi perikanan, perubahan iklim global, pengembangan sistem usaha kelautan dan perikanan serta penanggulangan kemiskinan.
- 5) Kelengkapan sarana-prasarana riset belum memadai dan masih harus ditingkatkan, ada beberapa yang usianya yang sudah tua, sehingga besar kemungkinan terjadi penurunan fungsi, serta sudah tidak maksimal mengikuti perkembangan kebutuhan yang ada sekarang.
- 6) Pengembangan sarana dan prasarana iptek harus dikelola dengan menerapkan sistem manajemen mutu. Saat ini-di tingkat BRSDM- baru satu UPT telah mendapatkan akreditasi dari Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP) dan dua laboratorium uji telah mendapatkan sertifikat International Organization for Standardization (ISO) 17025:2005. Laboratorium-laboratorium uji yang belum terakreditasi menyebabkan laboratorium uji di BRSDM KP belum sepenuhnya dipercaya oleh pengguna jasa.

## **E. LINGKUNGAN STRATEGIS**

Perkembangan suatu organisasi tentunya tidak terlepas dari perkembangan lingkungan strategisnya. Begitu pula dengan BRSDM KP yang menghadapi perubahan dan isu strategis yang perlu dihadapi untuk meningkatkan kinerja pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Langkah pertama bagi BRSDM KP dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis adalah upaya komunikasi, diseminasi dan difusi hasil litbang harus selalu ditingkatkan agar keluaran (output) hasil penelitian segera terbentuk menjadi outcome melalui penerapannya di tingkat pengguna sehingga manfaat serta dampak keberadaan BRSDM KP lebih dapat dirasakan oleh para pemangku kepentingan. Upaya yang mentransfer Keluaran iptek dan inovasi litbang menjadi *outcome* menjadi tantangan ke depan terutama dalam rangka mendukung sistem usaha yang kuat di kawasan minapolitan,

mengembangkan kewirausahaan pelaku usaha, memperkuat kelembagaan kelompok usaha, membentuk dan mengembangkan jaringan kerja dan kemitraan penelitian. Kesemuanya itu harus menghasilkan produksi perikanan yang sangat tinggi sesuai dengan visi KKP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Selain itu, tantangan ke depan yaitu dukungan litbang harus diperhatikan pula terhadap penyediaan iptek pada adaptasi terhadap dampak perubahan iklim global, globalisasi perdagangan, krisis keuangan global, dan penyelesaian batas maritim.

Upaya-upaya ini hendaknya berdampak pada penanggulangan kemiskinan, revitalisasi perikanan dan peningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lebih baik dan berkelanjutan. Untuk menjalankan itu semua pelaksanaan good-governance baik di BRSDM KP maupun di mitra kerja harus terus diimplementasikan. Agar tercipta kehandalan hasil pengujian laboratorium di lingkup BRSDM KP yang diterima oleh pengguna, akreditasi laboratorium litbang dan akreditasi lembaga litbang harus ditingkatkan. Model-model penerapan iptek untuk tujuan lainnya seperti membangun prototipe industri, pengembangan kawasan atau pengelolaan ekosistem ke depan harus dibangun terutama dalam mengimplementasikan prototipe pada skala industri dan komersial.

Lembaga nonstruktural seperti *publishing house*, komisi rekomendasi iptek dan tim analisis kebijakan harus terus dibina keberadaannya atau dibangun bila belum terbentuk. Keberadaan lembaga nonstruktural ini diharapkan dapat membantu mempercepat pembentukan keluaran. Pembinaan jaringan kerja yang sudah terbentuk ke depan harus terus dilakukan seperti Indonesian Network Fisheries Genetic Research and Development (INFIGRAD), Network Sosial Ekonomi Perikanan (Indonesian Marine and Fisheries Socio-Economic Research Network), dan Network Pengelolaan Sumberdaya Ikan yaitu Indonesian Fisheries Resources and Environment Management Network (INFREM) yang kesemuanya dilahirkan oleh Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (Ispikani). Demikian pula jaringan-jaringan penelitian yang terkait dengan kelautan seperti mitra bahari, jaringan kerja dalam pembangunan galangan kapal atau jaringan lainnya yang dibangun oleh Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI).

Sebagaimana BRSDM KP, LRSDKP juga berusaha menjaga irama kerja agar selalu bisa mendukung sepenuhnya kebijakan besar BRSDM KP. Menentukan tema dan judul kegiatan riset berdasarkan kebutuhan Eselon I lain selalu diupayakan. Selain itu kerjasama dengan pihak daerah selalu dijaga dan dirawat dengan berusaha menampung aspirasi terkait riset yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah. Prinsip kegiatan antar

sektor juga dikedepankan demi efektifitas pelaksanaan kegiatan/program dan efisiensi penggunaan anggaran.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

#### A. VISI

Sebelum menjelaskan tentang Visi BRSDM KP Periode 2015–2019, penting pula kita perhatikan pertimbangan yang digunakan dalam penentuan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP mempertimbangkan salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Renstra KKP secara tegas menyatakan Visi KKP adalah **“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”**. Kata ‘Mandiri’ dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Kata ‘Maju’ dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kata ‘Kuat’ diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. ‘Berbasis kepentingan nasional’ dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Visi KKP tersebut, BRSDM KP menyusun Visi BRSDM KP Tahun 2015-2019 yaitu:

*“Center of Excellence (Pusat Kepakaran) sebagai sumber inovasi IPTEK dan opsi kebijakan untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan”*.

BRSDM KP dalam visi tersebut secara eksplisit mendukung pencapaian Visi KKP melalui peranannya sebagai sumber inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Selain itu, atas prinsip *research based policy*, terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berdaulat, Mandiri dan Berkelanjutan untuk Kemakmuran Rakyat, melalui 3 pilar

yakni: kedaulatan (*sovereignty*), keberlanjutan (*sustainability*), dan kemakmuran (*prosperity*).

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan secara hirarki dari Pusat Riset Kelautan, maka LRSDKP mengadopsi Visi Pusat Riset Kelautan, yaitu “**Center of Excellence (Pusat Kepakaran) riset dan inovasi kelautan untuk mendukung visi misi BRSDM KP dan KKP**”

## **B. MISI**

Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan berbasiskan kepentingan Nasional, melalui:

- Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir yang handal;
- Peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir;
- Pendiseminasian hasil penelitian dan pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir.

## **C. TUJUAN**

LRSDKP sebagai bagian dari Pusat Riset Kelautan menyelaraskan tujuan utama organisasi dengan BRSDM KP dan KKP. Perumusan Tujuan Pembangunan Pusat Riset Kelautan Tahun 2015-2019 mempertimbangkan komponen tujuan dalam Renstra KKP dan BRSDM KP yang didedikasikan untuk dicapai pada tahun 2015-2019. Selain itu, Tujuan Pembangunan PUSAT RISET KELAUTAN disusun berdasarkan Misi PUSAT RISET KELAUTAN Tahun 2015- 2019.

Dalam Renstra KKP, menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka dinyatakan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

### **1. Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :**

- Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
- Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

### **2. Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :**

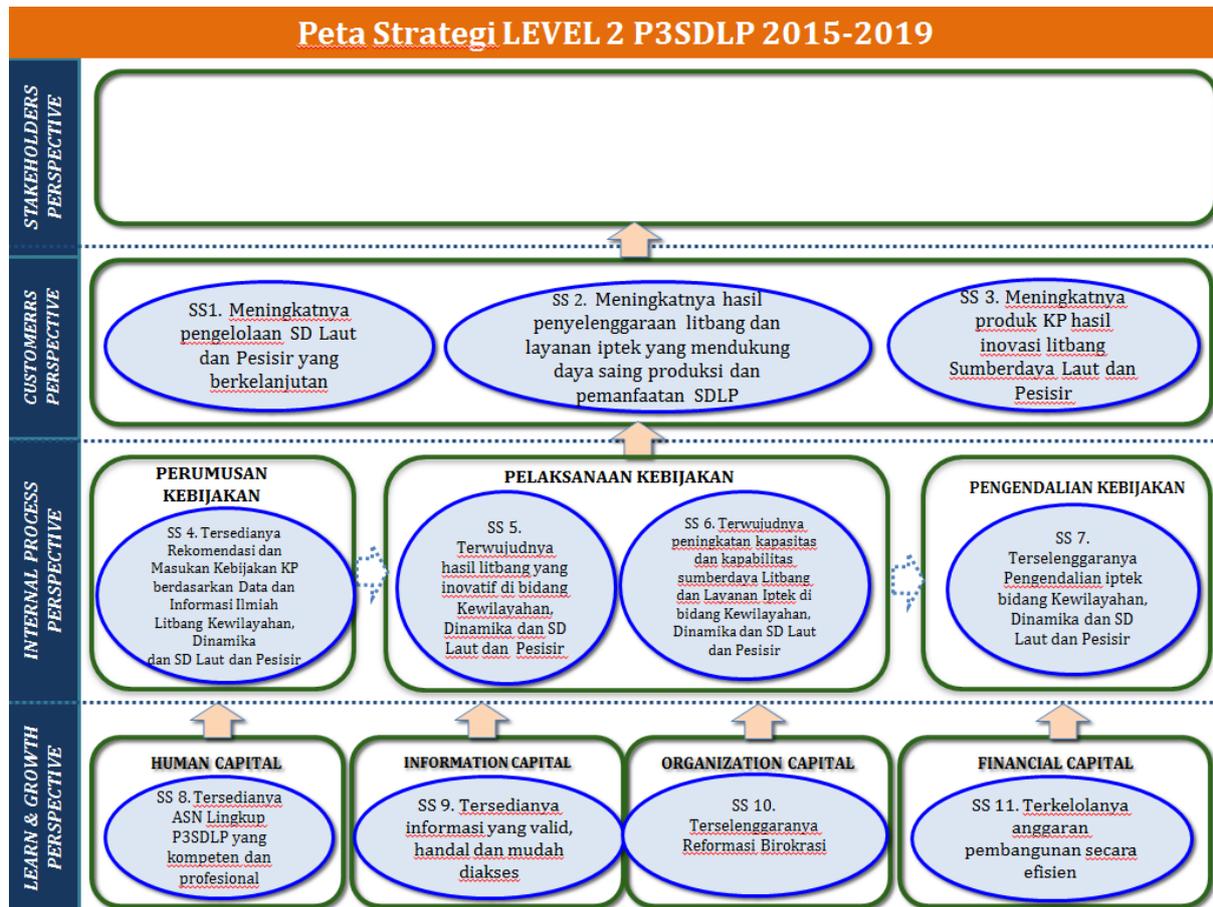
- Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
- Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

3. Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

- Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
- Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

**D. SASARAN STRATEGIS**

Peta strategi merupakan suatu *dashboard (panel instrument)* yang memetakan SS ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi Pusat Riset Kelautan. Peta strategi memudahkan BRSDM KP untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh pejabat/pegawai dalam rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian visi, misi, dan tujuan BRSDM KP. Peta strategi Pusat Riset Kelautan tahun 2017 yang disepakati antara Kepala BRSDM KP dengan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Februari 2017 ditunjukkan dalam Gambar 2.1 berikut.



Gambar : 2.1 Peta Strategi pusat riset kelautan Tahun 2017

Peta strategi Pusat Riset Kelautan memetakan setiap SS yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan

metodologi *Balanced Scorecard*, setiap SS dikelompokkan kedalam empat perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customers perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Dari perpektif *stakeholder*, tidak terdapat SS yang disusun. Dari *perspective customers* terhadap KKP dan masyarakat kelautan dan perikanan, terdapat SS yang disusun untuk meningkatnya pemanfaatan hasil Litbang KP oleh masyarakat KP dan meningkat pengelolaan SDKP yang berkelanjutan. Dari *perspective internal process* Pusat Riset Kelautan, untuk mendukung pencapaian SS pada dua layer *stakeholders perspective* dan *customers perspective* tersebut diperlukan adanya empat faktor penting berupa Tersedianya kebijakan kelautan dan perikanan yang implementatif, Tersedianya jumlah data dan informasi ilmiah KP, Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu dan Terselenggaranya pengendalian Litbang KP. Sedangkan dari perspektif *learning and growth*, terdapat empat faktor penting Tersedianya SDM BRSDM KP yang kompeten dan professional, Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses lingkup Pusat Riset Kelautan, Terwujudnya *good governance & clean government* lingkup Pusat Riset Kelautan dan Terkelolanya anggaran secara optimal lingkup Pusat Riset Kelautan. Sedangkan penjabaran dari sasaran strategis diatas pada Renstra disusunlah indikator kinerja dan targetnya sesuai dengan tabel di bawah ini.

Tabel : 2.1 Rencana Strategis Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>				
1	Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dinamika, kewilayahan, serta pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir oleh Masyarakat KP	5	Jumlah jejaring dan kemitraan Litbang SDLP	4
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>				
2	Tersedianya, data dan informasi dinamika, kewilayahan dan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir	11	Jumlah data dan informasi sumberdaya laut dan pesisir	3
		12	Jumlah karya tulis ilmiah bidang sumberdaya laut dan pesisir	18
<b>LEARNING &amp; GROWTH PERSPECTIVE</b>				

3	Tersedianya SDM PUSAT RISET KELAUTAN yang kompeten dan profesional	21	Proporsi jumlah peg fungsional PUSAT RISET KELAUTAN dibandingkan dengan total pegawai PUSRISKEL	53.00%
4	Terwujudnya <i>good governance &amp; clean government</i> di PUSAT RISET KELAUTAN	25	Jumlah rekomendasi pengawas eksternal pemerintah (APIP) Ditindaklanjuti dibanding rekomendasi di PUSAT KELAUTAN aparat internal yang total RISET	100%
		26	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja PUSAT RISET KELAUTAN	Nilai AKIP B
		27	Nilai integritas PUSAT RISET KELAUTAN	7
		28	Nilai Inisiatif anti korupsi PUSAT RISET KELAUTAN	7.75
		29	Nilai Penerapan RB PUSAT RISET KELAUTAN	80 (setara level 4)
		5	Terkelolanya anggaran secara akuntabel di PUSAT RISET KELAUTAN	30

Penuangan dari Renstra Pusat Riset Kelautan Tahun 2015-2019 diatas dituangkan kedalam rencana kinerja tahunan sesuai tabel di bawah ini.

Tabel : 2.2 Rencana Kerja Tahunan PUSAT RISET KELAUTAN TA 2015

SS DAN IKU		2015	2016	2017	2018	2019	CASCADING
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>							
SS 1. Meningkatnya pengelolaan SD Laut dan Pesisir yang berkelanjutan							
1	Jumlah WPP yang terpetakan potensi SD laut dan pesisir untuk pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan (akumulasi)	2	4	6	11	11	Lingkup Pusriskel
SS 2. Meningkatnya hasil penyelenggaraan litbang dan layanan iptek yang mendukung daya saing produksi dan pemanfaatan SD Laut dan Pesisir							
2	Jumlah hasil Litbang Sumberdaya Laut dan Pesisir yang terekomendasikan untuk Masyarakat dan Industri (buah)	2	2	2	2	2	Lingkup Pusriskel

3	Jumlah rekomendasi dan inovasi litbang SDLP yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan (buah)	3	3	3	3	3	Lingkup Pusriskel
4	Jumlah hasil litbang SDLP yang diadopsi oleh pengguna (buah)	1	1	1	1	1	Lingkup Pusriskel
5	Jumlah pengguna hasil Litbang SDLP (kelompok)	4	4	5	5	6	Lingkup Pusriskel
SS 3. Meningkatnya produk KP hasil inovasi litbang SD Laut dan Pesisir							
6	Jumlah Ragam Produk dan Jasa Kelautan Hasi Inovasi Litbang SDLP	1	1	2	2	2	Lingkup Pusriskel
SS 4. Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan KP berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah Litbang Kewilayahan, Dinamika dan SD Laut dan Pesisir							
7	Jumlah Rekomendasi Terkait Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Laut dan Pesisir Secara Berkelanjutan	8	8	8	8	8	Lingkup Pusriskel
8	Jumlah rekomendasi dan masukan kebijakan kawasan perairan pelabuhan, serta kawasan perlindungan dan konservasi (PL)	10	2	2	2	2	Lingkup Pusriskel
9	Jumlah Data dan/atau Informasi Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir dan Laut	5	5	5	5	5	LPSDKP
10	Karya Tulis Ilmiah Bidang IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumberdaya Laut dan Pesisir	45	45	45	45	45	Lingkup Pusriskel
11	Jumlah Kawasan Pesisir yang Terpetakan Sumberdayanya	10	5	5	5	5	Lingkup Pusriskel
12	Jumlah WPP yang terpetakan karakteristik dan dinamika laut	5	5	5	5	5	Lingkup Pusriskel
SS 5. Terwujudnya hasil litbang yang inovatif di bidang Kewilayahan, Dinamika dan SD Laut dan Pesisir							
13	Jumlah Paket Penerapan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumberdaya Laut dan Pesisir	3	3	3	3	3	Lingkup Pusriskel
14	Jumlah sentra nelayan yang terbangun sistem informasinya (kumulatif) (QW)	30	20	15	20	15	Lingkup Pusriskel
SS 6. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek di bidang Kewilayahan, Dinamika dan SD Laut dan Pesisir							
15	Proporsi pegawai fungsional lingkup PUSAT RISET KELAUTAN dibandingkan total pegawai lingkup PUSAT RISET KELAUTAN (%)	55	60	65	70	75	Lingkup Pusriskel
16	Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan Litbang IPTEK Kewilayahan, Dinamika, Sumberdaya Pesisir dan Laut yang terfasilitasi	2	2	2	2	2	Lingkup Pusriskel

17	Jumlah Sarana Prasarana Litbang sumber daya laut (PL)	2	1	1	1	1	Lingkup Pusriskel
18	Jumlah jejaring dan kerjasama litbang di bidang Kewilayahan, Dinamika dan SD Laut dan Pesisir yang terbentuk (buah)	4	4	4	4	4	Lingkup Pusriskel
19	Jumlah <i>Techno Park</i> Kelautan dan Perikanan yang dibangun dan dikembangkan sebagai pusat penerapan iptek dalam skala ekonomi di daerah (buah, akumulasi) (QW)	3	3	4	4	4	Lingkup Pusriskel
SS 7. Terselenggaranya Pengendalian iptek bidang Kewilayahan, Dinamika dan SD Laut dan Pesisir							
20	Proporsi kegiatan penelitian terapan dan pengembangan eksperimental dibandingkan total kegiatan Litbang Kewilayahan, Dinamika dan SD Laut dan Pesisir (minimal)	95%	93%	94%	94%	94%	Lingkup Pusriskel
SS 8. Tersedianya ASN Lingkup PUSAT RISET KELAUTAN yang kompeten dan profesional							
21	Jumlah SDM Lingkup PUSAT RISET KELAUTAN yang dikembangkan kompetensinya	14	14	15	15	17	Lingkup Pusriskel
SS 9. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses							
22	Indeks pemanfaatan informasi KP berbasis IT (%)	> 75%	> 75%	> 80%	> 80%	> 85%	Lingkup Pusriskel
SS 10. Terwujudnya Reformasi Birokrasi							
23	Indeks RB PUSAT RISET KELAUTAN	BB	A	A	A	AA	Lingkup Pusriskel
24	Nilai/Skor SAKIP PUSAT RISET KELAUTAN	A	A	A	AA	AA	Lingkup Pusriskel
25	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PUSAT RISET KELAUTAN	70,10	72,00	73,00	75,00	77,00	Lingkup Pusriskel
26	Jumlah usulan unit kerja yang berstatus Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (satker)	1	1	1	1	1	Lingkup Pusriskel
SS 11. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien							
27	Nilai efisisensi anggaran (%)	> 95	> 95	> 95	> 95	> 95	Lingkup Pusriskel

### Rencana Strategis LRSDKP tahun 2019

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
CUSTOMER PERSPECTIVE				
1	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab dan berkelanjutan	1	Nilai PNBK LRSDKP	0,00558
		2	Jumlah bahan rekomendasi kebijakan Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang diusulkan ke Pusriskel (Dokumen)	2
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				

2	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan	3	Jumlah Data dan/atau Informasi hasil Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (paket)	3
		4	Jumlah jejaring dan/atau kerjasama Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang diusulkan untuk ditindaklanjuti ke Pusat Riset Kelautan (dokumen)	2
		5	Jumlah Karya Tulis Ilmiah Riset Kelautan yang diterbitkan (dokumen)	10
<b>LEARNING &amp; GROWTH PERSPECTIVE</b>				
3	Terwujudnya ASN Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang kompeten, profesional dan berintegritas	6	Indeks profesionalitas ASN LRSDKP (indeks)	60
4	Tersedianya manajemen pengetahuan LRSDKP yang handal dan mudah diakses	7	Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan (%)	80
5	Terwujudnya birokrasi LRSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	8	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup LRSDKP (%)	80
6	Terkelolanya anggaran secara akuntabel	9	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran LRSDKP (%)	87
		10	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP dibanding realisasi anggaran LRSDKP (%)	1

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, (4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah. Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2015-2019 dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi social Indonesia.

#### B. Arah Kebijakan dan Strategi Riset Nasional

##### Rencana induk Riset Nasional

Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan Nasional (SINAS) maka:

1. Setiap unsur lembaga pelaksana ilmu pengetahuan dan teknologi harus menyadari dan mengupayakan secara sungguh-sungguh penyelenggaraan fungsi dan perannya dalam perkembangan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Semua unsur lembaga harus menyadari bahwa kapasitas dan kemampuan yang dimiliki tidak banyak berarti apabila tidak dikaitkan dengan kapasitas dan kemampuan unsur-unsur kelembagaan yang lain dalam hubungan yang saling memperkuat, saling mengisi, dan saling mengendalikan. Dengan demikian, secara keseluruhan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki tersebut dapat menumbuhkan rantai penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara utuh untuk mendukung pencapaian tujuan negara serta memperkuat posisi negara dalam pergaulan internasional.
3. Lembaga-lembaga pendukung yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penyediaan daya dukung serta pembentukan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta penda penggunaannya ke dalam kegiatan ekonomi harus menyadari bahwa tindakannya dapat memiliki dampak yang luas bagi perkembangan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.
4. Pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat harus menyadari pentingnya peran serta semua pihak dalam meningkatkan motivasi, stimulasi, fasilitasi bagi pelaksana ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dalam memperbesar sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai serta menyediakan berbagai bentuk insentif agar segala potensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dapat berkembang dengan baik.

### **C. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan KP**

#### **Arah Kebijakan BRSDM KP**

Berdasarkan pertimbangan arah kebijakan dan strategi KKP maka BRSDM KP menetapkan arah kebijakan pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan yang akan dilakukan oleh BRSDM KP. Penetapan arah kebijakan ini juga mengacu kepada Visi dan Misi serta Tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Arah kebijakan pengembangan BRSDM KP Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Litbang berawal dan berakhir pada pengguna (*starts from and ends with the users*)

Bahwa kegiatan Litbang mulai usulan hingga produk yang dihasilkan diorientasikan pada kebutuhan dan keinginan pengguna yaitu: stakeholder utama Menteri KP dan Eselon I KKP. Hal ini penting agar penelitian dan pengembangan yang telah dihasilkan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

2. Litbang harus *policy driven*.

Litbang Kelautan dan Perikanan merupakan bagian dari strategi dan kebijakan pembangunan nasional, begitu pula dengan BRSDM KP sebagai bagian dari unit kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan kementerian dan lembaga teknis yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu, program dan kegiatan Litbang KP harus mengikuti dan mendukung arah, prioritas dan *goal* dari kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saat ini sudah bukan lagi era dimana kegiatan penelitian dan pengembangan untuk memenuhi kepentingan peneliti dan perekayasa saja.

2. Litbang KP nasional yang inovatif.

Pelaku Litbang di bidang kelautan dan perikanan, tidak hanya di BRSDM KKP namun juga terdapat di kementerian dan lembaga pemerintah di luar KKP, termasuk perguruan tinggi yang tersebar di berbagai provinsi, BRSDMda, LSM termasuk pelaku Litbang swadaya di masyarakat, dan juga di industri atau swasta.

Dalam rangka penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pada Tahun 2015 – 2019, BRSDM KP mempunyai satu program dan delapan kegiatan. Program yang digunakan yaitu Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan. Keberhasilan kinerja atas pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab unit Eselon I yaitu BRSDM KP, sedangkan keberhasilan atas pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab masing-masing unit Eselon II Lingkup BRSDM KP. Detail pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BRSDM KP dapat ditunjukkan pada Tabel berikut ini:

Tabel Program dan Kegiatan BRSDM KP

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN
1	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan	1.1	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan
		1.2	Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir
		1.3	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
		1.4	Penelitian Sosial Ekonomi dan Analisis Kebijakan Kelautan dan Perikanan
		1.5	Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi Kelautan dan Perikanan
		1.6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

BRSDM KP juga melakukan penetapan fokus kegiatan penelitian dan pengembangan selama periode 2015 – 2019, yang diarahkan untuk mendukung 10 Fokus Litbang, yaitu:

1. Sustainable Fisheries
2. Sustainable Aquaculture
3. Perubahan iklim
4. Jasa kelautan
5. Kemandirian pangan dan bahan baku industri
6. Konservasi dan mitigasi serta rehabilitasi
7. Inovasi teknologi
8. Poverty reduction dan pemberdayaan masyarakat
9. Pengembangan usaha, sistem bisnis dan trading
10. Kajian kewilayahaan dan geopolitik

#### **Arah Kebijakan PUSAT RISET KELAUTAN**

Dalam rangka menindaklanjuti arah kebijakan BRSDM KP, arah kebijakan PUSAT RISET KELAUTAN fokus pada:

1. Perubahan iklim
2. Jasa kelautan
3. Konservasi dan mitigasi serta rehabilitasi
4. Inovasi teknologi
5. Kajian kewilayahaan dan geopolitik

#### D. Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Renstra KKP Tahun 2015 - 2019 menyatakan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yakni:

1. Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dari *production oriented* ke *people oriented*.
2. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat
3. teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
4. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
5. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang *right sizing*, *unified function*, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan.
6. Tata laksana dan sumber daya aparatur

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP telah melakukan penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kelengkapan organisasi PUSAT RISET KELAUTAN termasuk dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat terlihat pada Gambar 1.1 pada bagian sebelumnya.

Pengembangan Kelembagaan /UPT PUSAT RISET KELAUTAN Kedepan PIAMARI, MIAMARI, Instalasi Pamekasan, Saumlaki, Natuna, Sidoarjo.

FOKUS KELTI/KELTIBANG LINGKUP PUSAT RISET KELAUTAN 2015-2019

Fokus Analisis Kebijakan Perubahan Iklim (KPI)

Tugas dan Fungsi KPI:

- 1) Melakukan kajian kebijakan perubahan iklim untuk industri kelautan dan perikanan
- 2) Melakukan penelitian perubahan iklim di laut dan pesisir
- 3) Melakukan kajian hidrodinamika, variabilitas iklim dan laut
- 4) Melakukan prediksi kondisi laut (pasang-surut, suhu laut, arus dan seterusnya)

**Wilayah Kerja KPI:** Nasional , di darat dalam batas kabupaten/kotamadya, di laut dalam daerah perairan Teritorial hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan dalam batas Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Tema Sentral KPI 2015-2019 :

Kajian hidrodinamika perairan Indonesia; Kajian variabilitas iklim dan laut; dan kajian monsun

Karakter/Pola Umum kegiatan KPI:

- 1) Melakukan studi pustaka
- 2) Melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi lain di pusat dan daerah.
- 3) Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD), seminar atau workshop
- 4) Melakukan pengumpulan data primer dari lapangan , melakukan pengukuran parameter-parameter kimia, fisika, biologi dan lain-lain
- 5) Melakukan pengumpulan data sekunder
- 6) Membuat laporan rutin, terjadwal dan laporan akhir
- 7) Membuat karya tulis ilmiah

Fokus Analisis Kebijakan Pengelolaan Pesisir (KPP)

Tugas dan Fungsi KPP:

- 1) Melakukan kajian kebijakan pengelolaan pesisir
- 2) Melakukan kajian zonasi dan daya dukung

**Wilayah Kerja KPP:** Nasional , di darat dalam batas kabupaten/kotamadya, di laut dalam daerah perairan Teritorial hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan dalam batas Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Tema Sentral KPP 2015-2019 :

Kajian zonasi, daya dukung dan kajian kebijakan pengelolaan pesisir oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota)

Karakter/Pola Umum kegiatan KPP:

- 1) Melakukan studi pustaka
- 2) Melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi lain di pusat dan daerah.
- 3) Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD), seminar atau workshop
- 4) Melakukan pengumpulan data primer dari lapangan , melakukan pengukuran parameter-parameter kimia, fisika, biologi dan lain-lain
- 5) Melakukan pengumpulan data sekunder
- 6) Membuat laporan rutin, terjadwal dan laporan akhir
- 7) Membuat karya tulis ilmiah

Fokus Kajian Karbon Biru (*Blue Carbon*)(BC)

Tugas dan Fungsi BC:

- 1) Melakukan kajian kapasitas ekosistem mangrove dalam menyerap karbon
- 2) Melakukan kajian kapasitas ekosistem padang lamun dalam menyerap karbon

**Wilayah Kerja BC:** Nasional , di darat dalam batas kabupaten/kotamadya, di laut dalam daerah perairan Teritorial hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan dalam batas Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Tema Sentral BC 2015-2019 :

Kajian daya serap karbon oleh ekosistem mangrove dan padang lamun

Karakter/Pola Umum kegiatan BC:

- 1) Melakukan studi pustaka
- 2) Melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi lain di pusat dan daerah.
- 3) Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD), seminar atau workshop
- 4) Melakukan pengumpulan data primer dari lapangan , melakukan pengukuran parameter-parameter kimia, fisika, biologi dan lain-lain
- 5) Melakukan pengumpulan data sekunder
- 6) Membuat laporan rutin, terjadwal dan laporan akhir
- 7) Membuat karya tulis ilmiah

Fokus Kajian Sumberdaya Air Laut dan Garam (SDALG)

Tugas dan Fungsi SDALG:

- 1) Melakukan pemetaan sumberdaya laut dan pesisir untuk mendukung lahan garam
- 2) Melakukan penyediaan paket teknologi peningkatan kualitas garam dan produk turunan garam

**Wilayah Kerja SDALG:** Nasional , di darat dalam batas kabupaten/kotamadya, di laut dalam daerah perairan Teritorial hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan dalam batas Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Tema Sentral SDALG2015-2019 :

Kajian terkait produksi garam, lahan tambak garam, metodologi pembuatan garam, paket teknologi pengolahan garam, sistem informasi garam nasional dan kajian produk turunan garam.

Karakter/Pola Umum kegiatan SDALG :

- 1) Melakukan studi pustaka
- 2) Melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi lain di pusat dan daerah.
- 3) Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD), seminar atau workshop

- 4) Melakukan pengumpulan data primer dari lapangan , melakukan pengukuran parameter-parameter kimia, fisika, biologi dan lain-lain
- 5) Melakukan pengumpulan data sekunder
- 6) Membuat laporan rutin, terjadwal dan laporan akhir
- 7) Membuat karya tulis ilmiah

Fokus Kajian Geodinamika dan Sumberdaya Laut Dalam (GeoDeep)

Tugas dan Fungsi GeoDeep :

- 1) Melakukan penelitian geodinamika dan karakteristik sumberdaya laut dalam
- 2) Melakukan kajian pengembangan potensi sumberdaya laut dalam
- 3) Melakukan kajian pengembangan potensi sumberdaya arkeologi bawah laut
- 4) Melakukan kajian pengembangan potensi sumberdaya non hayati
- 5) Melakukan penyusunan data dan informasi hasil penelitian sebagai bahan publikasi ilmiah dan populer

**Wilayah Kerja GeoDeep:** Nasional , di darat dalam batas kabupaten/kotamadya, di laut dalam daerah perairan Teritorial hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan dalam batas Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Tema Sentral GeoDeep 2015-2019 :

Kajian analisis karakteristik sumberdayalaut dalam; Kajian dinamika dan lingkungan laut; Kajian model pemanfaatan langsung sumberdaya aktivitas geothermal; Kajian pengembangan potensi sumberdaya arkeologi bawah laut

Karakter/Pola Umum kegiatan GeoDeep:

- 1) Melakukan studi pustaka
- 2) Melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi lain di pusat dan daerah.
- 3) Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD), seminar atau workshop
- 4) Melakukan pengumpulan data primer dari lapangan , melakukan pengukuran parameter-parameter kimia, fisika, biologi dan lain-lain
- 5) Melakukan pengumpulan data sekunder
- 6) Membuat laporan rutin, terjadwal dan laporan akhir
- 7) Membuat karya tulis ilmiah

Fokus Kajian Daya Dukung Sumberdaya Pesisir (Daya Dukung SDP)

Tugas dan Fungsi Daya Dukung SDP:

- 1) Melakukan kajian potensi dan daya dukung sumberdaya pesisir
- 2) Melakukan kajian potensi sumberdaya air tanah

**Wilayah Kerja Daya Dukung SDP:** Nasional , di darat dalam batas kabupaten/kotamadya, di laut dalam daerah perairan Teritorial hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan dalam batas Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Tema Sentral Daya Dukung SDP 2015-2019 :

Kajian potensi dan daya dukung sumberdaya pesisir; Kajian potensi sumberdaya air tanah

Karakter/Pola Umum kegiatan Daya Dukung SDP:

- 1) Melakukan studi pustaka
- 2) Melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi lain di pusat dan daerah.
- 3) Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD), seminar atau workshop
- 4) Melakukan pengumpulan data primer dari lapangan. Dalam kajian potensi daya dukung sumberdaya pesisir, parameter yang diukur :
  - a) parameter fisika : iklim; suhu perairan; total suspended sediment (TSS); turbidity; arus; pasang surut (pasut); gelombang
  - b) parameter kimia : logam berat; PAHs; POPs; salinitas; unsur kimia; dissolved oxygen (DO); BOD; pH; nutrient
  - c) parameter biologi : mangrove; lamun; terumbu; planktonik; bentonik
  - d) parameter geologi : material; proses; morfologi; air tanah

Dalam kajian potensi sumberdaya air tanah, parameter yang diukur :

- a) parameter fisika : iklim; suhu perairan; turbidity; pasut
  - b) parameter kimia : logam berat; salinitas; unsur kimia
  - c) parameter biologi : mangrove; lamun; terumbu; planktonik; bentonik
  - d) parameter geologi : material; proses; morfologi; air tanah
- 5) Melakukan pengumpulan data sekunder
  - 6) Membuat laporan rutin, terjadwal dan laporan akhir
  - 7) Membuat karya tulis ilmiah

Fokus Kajian Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kelautan

Fokus Penelitian dan Observasi Laut

Dalam rangka memujudkan visi dan misi, arah kebijakan Penelitian dan Observasi laut sebagai berikut:

- a. Optimalisasi dalam penyediaan basis data kelautan nasional dengan berbagai metode, baik data pemodelan, penginderaan jauh maupun data lapangan dengan dukungan sarana dan prasarana riset yang memadai.

- b. memperkuat basis data dan menyempurnakan manajemen data dan informasi nasional untuk pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. memperkuat inovasi teknologi bagi komoditas unggulan dan prospektif, yang berorientasi pada daya saing, pasar dan kebutuhan masyarakat serta keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- d. memperkuat iptek untuk pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan;
- e. mempercepat penyebaran dan pemanfaatan hasil litbang iptek dengan menjalin kerjasama dengan institusi yang berwenang;
- f. meningkatkan kapasitas, sinergi dan integrasi di Balai Penelitian dan Observasi Laut;

#### Fokus Kajian Kerentanan Pesisir

##### Tugas dan Fungsi Kerentanan Pesisir:

- 1) Melakukan kajian kerentanan pesisir [abrasi; akresi; tsunami; *storm surge*]
- 2) Melakukan kajian *marine pollutant*
- 3) Melakukan kajian arkeologi maritim

**Wilayah Kerja Kerentanan Pesisir:** Nasional , di darat dalam batas kabupaten/kotamadya, di laut dalam daerah perairan Teritorial hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan dalam batas Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

##### Tema Sentral Kerentanan Pesisir 2015-2019 :

Kajian kerentanan pesisir, *marine pollutant* dan arkeologi maritim

##### Karakter/Pola Umum kegiatan Kerentanan Pesisir:

- 1) Melakukan studi pustaka
- 2) Melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi lain di pusat dan daerah.
- 3) Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD), seminar atau workshop
- 4) Melakukan pengumpulan data primer dari lapangan. Dalam kajian kerentanan pesisir, parameter yang diukur :
  - a) parameter fisika : pasut; arus; gelombang; turbidity; TSS
  - b) parameter biologi : mangrove; terumbu; lamun
  - c) parameter geologi : material; proses; morfologi

Dalam kajian *marine pollutant* parameter/data yang diukur :

- a) parameter fisika : iklim; suhu perairan; turbidity; arus; gelombang; tinggalkan arkeologis
- b) parameter kimia : logam berat; PAHs; POPs; salinitas; unsur kimia; DO; BOD

- c) parameter biologi : mangrove; lamun; terumbu; planktonik; bentonik
- e) parameter geologi : material; proses; morfologi; air tanah

Dalam kajian arkeologi maritim parameter/data yang diukur :

- a) parameter fisika : iklim; suhu perairan; turbidity; arus; gelombang;
  - b) parameter kimia : salinitas; unsur kimia
  - c) parameter biologi : mangrove; lamun; terumbu
  - d) parameter geologi : material; proses; morfologi; air tanah
- 
- 5) Melakukan pengumpulan data sekunder
  - 6) Membuat laporan rutin, terjadwal dan laporan akhir
  - 7) Membuat karya tulis ilmiah

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**A. Target Kinerja**

**1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis PUSAT RISET KELAUTAN**

Berdasarkan analisis Balanced Score Card (BSC) BRSDM KP, kita telah mengetahui bahwa tidak memiliki indikator kinerja pada stakeholders perspective karena hal ini mengacu pada target sasaran strategis kementerian. Sehingga PUSAT RISET KELAUTAN lebih memberikan dukungan kepada pengguna produk dan jasa litbang terutama Unit Eselon I Lingkup KKP.

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2015	2016	2017	2018	2019
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE						
SS 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP						
1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP	40,5	42	45	47,5	51
2	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7,00	7,05	7,10	7,15	7,20
CUSTOMERS PERSPECTIVE						
SS 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP						
3	Persentase kepatuhan ( <i>compliance</i> ) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%)	70	73	76	81	87
4	Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri	5	10	15	20	25
SS 3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan						
5	Nilai Pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan	0,20	0,29	0,39	0,57	0,65
6	Nilai peningkatan ekonomi KP	0,59	0,69	0,79	0,90	1,00
7	Produksi perikanan (juta ton)	24,12	26,04	30,29	32,93	39,97
8	Produksi garam rakyat (juta ton)	3,3	3,6	3,8	4,1	4,5
9	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	5,86	6,82	7,62	8,53	9,54
10	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	40,9	43,88	47,12	50,65	54,49
11	Persentase peningkatan PNBPN dari sektor KP (%)	5	7,5	10	12,5	15

## 2 Indikator Kinerja Program

Sesuai petunjuk yang diberikan dalam Renstra KKP, Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2015	2016	2017	2018	2019
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE						
CUSTOMERS PERSPECTIVE						
SS 1. Meningkatnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan						
1	Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPP PUD) yang Terpetakan Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan untuk Pengembangan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan	11 WPP 5 KPP PUD	11 WPP 6 KPP PUD	11 WPP 6 KPP PUD	11 WPP 7 KPP PUD	11 WPP 7 KPP PUD
	SS 2. Meningkatnya hasil penyelenggaraan litbang dan layanan iptek yang mendukung produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP					
2	Persentase hasil litbang KP yang digunakan sesuai dengan Kontrak Kinerja Eselon I KKP (%)					
3	Jumlah Rekomendasi dan/atau inovasi litbang yang diusulkan untuk menjadi bahan kebijakan (buah)					
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE KP)						
SS 3. Tersedianya Rekomendasi dan Masukan kebijakan pembangunan KP yang efektif						
4	Jumlah Rekomendasi dan masukan kebijakan KP (Buah)	36	45	60	75	90
5	Jumlah Data dan Informasi Ilmiah KP (paket)					
6	Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan (KTI)					
SS 4. Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif untuk penyelenggaraan tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan						
7	Jumlah hasil Litbang KP yang terekomendasikan untuk masyarakat dan/atau industri (buah)					
8	Jumlah Hasil litbang yang inovatif untuk pembangunan KP (buah)					
9	Jumlah Hasil Litbang yang diusulkan HKI dan/atau dirilis (Buah)					
SS 5. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Litbang, dan Layanan Iptek KP						
10	Proporsi Fungsional BRSDM KP dibandingkan total pegawai BRSDM KP (%)					
11	Jumlah Sarana dan prasarana, serta kelembagaan litbang KP yang ditingkatkan kapasitasnya (buah)					
12	Jumlah jejaring dan/atau kerjasama litbang yang terbentuk (Buah)					
SS 6. Terselenggaranya Pengendalian litbang KP						

13	Proporsi kegiatan riset aplikatif dibandingkan total kegiatan riset litbang KP (%)					
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE						
SS 7. Terwujudnya ASN BRSDM KP yang kompeten, profesional dan berkepribadian						
14	Indeks kompetensi dan integritas	65	77	75	80	85
SS 8. Tersedianya manajemen pengetahuan BRSDM KP yang handal dan mudah diakses						
15	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	40	50	60	70	100
SS 9. Terwujudnya birokrasi BRSDM KP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima						
16	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi BRSDM KP	BB	BB	A	A	AA
SS 10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel						
17	Nilai kinerja anggaran BRSDM KP	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)
18	Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup BRSDM KP (%)	100	100	100	100	100

### 3. Indikator Kinerja Kegiatan

Renstra KKP menjelaskan bahwa Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output).

Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di KKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II, dalam hal ini Unit Eselon II Lingkup BRSDM KP

#### B. Kerangka Pendanaan

Pusat Riset Kelautan dalam melaksanakan program dan kegiatannya melakukan pengelolaan penganggaran yang menjunjung tinggi prinsip efisiensi, efektivitas dan sebesar-besarnya memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia. Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam Bab terdahulu, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Terkait dengan Renstra BRSDM KP, secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan dapat ditunjukkan pada Lampiran.

## BAB V PENUTUP

Review Rencana Strategis PUSAT RISET KELAUTAN Tahun 2015-2019 merupakan penyempurnaan dari dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pesisir dan Laut (PUSAT RISET KELAUTAN), Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Renstra PUSAT RISET KELAUTAN ini disusun untuk menjabarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis BRSDM KP Tahun 2015-2019 digunakan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kinerja yang telah ditetapkan, dan akan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis BRSDM KP Tahun 2015-2019, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.